

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sampel penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat pada periode 2008 sampai 2012. Berdasarkan Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Leverage* tidak memiliki hasil yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi yang telah menganggarkan *leverage* dengan nilai yang besar namun realisasi yang dilakukan terhadap *leverage* tersebut kurang efektif sehingga efeknya terhadap penggunaan *leverage* itu sendiri tidak akan mempengaruhi penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena apabila *leverage* diterapkan dalam pemerintahan daerah, posisi *leverage* tidak dapat disamakan pada kondisi dari suatu unit usaha karena pembiayaan eksternal pemerintah daerah tidak hanya melalui utang tetapi juga berasal dari dana bantuan pemerintah pusat yaitu dana perimbangan.
2. *Intergovernmental Revenue* memiliki hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar transfer *intergovernmental revenue* atau dana perimbangan yang

diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. Sama halnya dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat yang benar-benar memanfaatkan sumber dana tersebut untuk kelangsungan kinerja keuangan pemerintah daerah tanpa ada pengembalian dana didalamnya.

3. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa *Leverage* dan *Intergovernmental Revenue* memiliki hasil yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/ Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat periode 2008-2012. Akan tetapi tidak ditemukan bukti bahwa *Leverage* memiliki hasil yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/ Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat periode 2008-2012.

5.2 Implikasi

1. *Leverage* tidak memiliki hasil yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin besar *leverage* semakin menunjukkan entitas atau pemerintah daerah tidak mampu dalam membiayai operasionalnya sendiri karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sedangkan semakin kecil *leverage* semakin besar kemampuan entitas dalam membiayai biaya operasional melalui dana internalnya. Pada kinerja keuangan pemerintah daerah peran *leverage*

tidak memberikan kontribusi besar karena transfer pemerintah pusat melalui *leverage* kepada pemerintah daerah terdapat pengembalian *leverage* tersebut di tahun-tahun selanjutnya.

2. Intergovernmental Revenue memiliki hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Proxy dari *intergovernmental revenue* dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara total dana perimbangan dengan total pendapatan. Proxy ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah sangat bergantung dari transfer dana pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memanfaatkan fungsi dari transfer tersebut dalam penggunaan setiap operasi atau kegiatan di daerah tersebut. *Intergovernmental Revenue* ini berguna bagi pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Namun karena bergantungnya pemerintah daerah akan transfer pemerintah pusat melalui *intergovernmental revenue* akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa *Leverage* dan *Intergovernmental Revenue* memiliki hasil yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/ Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat periode 2008-2012. Karena dalam penggunaan transfer antara leverage dan *intergovernmental revenue* berbeda, jika pemerintah daerah hati-hati dalam penggunaan leverage yang memiliki pengembalian didalamnya beda halnya dengan *intergovernmental revenue* yang sangat

dibutuhkan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan otonomi daerah.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan diantaranya adalah:

- a. Bagi penelitian berikutnya diharapkan bisa melakukan :
 1. Mengganti proxy rasio keserasian dengan rasio lainnya untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena masih banyak rasio lainnya yang belum diteliti dalam penelitian ini.
 2. Koefisien determinasi sebesar 11,1 % menunjukkan masih terdapat banyak faktor dari komponen independen yang mampu menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah pada suatu provinsi. Contohnya di Provinsi Jawa Barat, masih terdapat beberapa komponen independen lainnya seperti pendapatan asli daerah, ukuran legislatif, kemakmuran, belanja modal, dan retribusi daerah.
 3. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperluas populasi penelitian dengan menambah jumlah periode tahun penelitian dan wilayah penelitian agar hasil penelitian lebih akurat dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.